

KAJIAN AKSES WARGA ATAS INFORMASI ANGGARAN DAERAH

Studi Penyediaan Informasi Anggaran Daerah pada Website Resmi
Pemerintah Daerah di 505 Kabupaten/ Kota di Indonesia



AKSES WARGA ATAS INFORMASI ANGGARAN DAERAH

Studi Penyedia Informasi Anggaran Daerah pada
Website Resmi Pemerintah Daerah di 505
Kabupaten/Kota di Indonesia

AKSES WARGA ATAS INFORMASI ANGGARAN DAERAH

Studi Penyedia Informasi Anggaran Daerah pada *Website* Resmi Pemerintah Daerah
di 505 Kabupaten/Kota di Indonesia

Tim Peneliti

Sugeng Wibowo

Rudy Rahadian

Maya Fathia

Sardi Winata

Iis Yuni

Editor

Arief Tajalli

Sampul dan Tata Letak

Arief Tajalli

Penabulu Alliance 2014

Daftar isi

Daftar isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	ii
Daftar Istilah	ii
Daftar Singkatan	iii
Ringkasan Eksekutif	1
Konteks Kajian	2
Kajian Terbatas	2
KONTEKS	3
<i>Transparansi Informasi Anggaran Daerah Era Digital</i>	3
KAJIAN	7
<i>Rancangan Kajian</i>	7
<i>Tujuan</i>	7
<i>Batasan</i>	7
<i>Metodologi</i>	7
<i>Pembobotan Parameter Penilai</i>	8
<i>Kriteria dan Skor Parameter</i>	8
HASIL	12
<i>Aspek 1: Keberadaan Website Resmi Pemerintah Daerah</i>	13
<i>Aspek 2: Keberadaan Menu Konten dengan Nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”</i>	14
<i>Aspek 3: Ketersediaan Data Terbaru (Mutakhir)</i>	15
<i>Aspek 4: Ketersediaan Data Tahun Sebelumnya</i>	15
<i>Aspek 5: Kualitas Penyajian Informasi Anggaran</i>	16
<i>Rata-Rata Nilai Per Provinsi</i>	18
<i>15 Website Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik</i>	19
CATATAN	20
LAMPIRAN	22
<i>Hasil Penilaian Keseluruhan</i>	

Daftar Tabel

Tabel 1. Tingkatan-tingkatan dalam pengembangan <i>e-government</i>	4
Tabel 2. Parameter penilaian ketersediaan data baru	10
Tabel 3. Pembobotan, Kriteria dan Skor dari masing-masing parameter	11
Tabel 4. 15 <i>Website</i> Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Tahapan pengujian parameter	9
Gambar 2. Tahapan metodologi dan aspek penelitian	12
Gambar 3. Tahapan proses penelitian berdasarkan aspek yang ada	13
Gambar 4. <i>Diagram keberadaan website pemerintah daerah</i>	13
Gambar 5. Keberadaan menu konten	14
Gambar 6. Ketersediaan data terbaru (Mutakhir)	15
Gambar 7. Ketersediaan data tahun sebelumnya	15
Gambar 8. Kualitas penyajian informasi anggaran	16
Gambar 9. Tampilan informasi anggaran dalam bentuk infografis di <i>website</i> Pemerintah Kota Ambon	17
Gambar 10. Tabel rata-rata nilai per-Provinsi	18

Daftar Istilah

Hosting server	Sebuah komputer yang disambungkan ke internet dan online selama 24 jam yang berfungsi sebagai media penyimpanan data-data sebuah <i>website</i> agar dapat diakses di internet
Domain	Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat (IP address) server komputer seperti web server atau email server di internet
<i>Website</i>	Sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya

Daftar Singkatan

SINGKATAN	KEPANJANGAN
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Inpres	Instruksi Presiden
UU	Undang Undang
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RAPERDA	Rancangan Peraturan Daerah
PERDA	Peraturan Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
TPAD	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
K/L	Kementerian/Lembaga
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
G2G	Government-to-Government
G2B	Government-to-Business
G2C	Government-to-Citizen
PUSDATINKOMTEL	Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi
KOMINFO	Komunikasi dan Informasi
UN-ASPAA	United Nations- American Standard Public Administration

RINGKASAN EKSEKUTIF

Website merupakan salah satu media yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi publik dengan mudah. Kelebihannya adalah bisa diakses di semua tempat selama ada koneksi internet dan tidak terbatas oleh waktu. Publikasi informasi anggaran daerah di *website* resmi Pemda akan memudahkan publik dalam mengakses informasi anggaran daerah bila tersedia dengan baik dan lengkap.

Akses warga atas informasi anggaran daerah mendukung keterbukaan badan publik dalam mengumumkan informasi publik. Hal tersebut dapat dikaji dengan menilai kualitas penyediaan informasi anggaran daerah pada *website* resmi Pemerintah Daerah di 505 Kabupaten/Kota di Indonesia. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim peneliti menggunakan parameter penilaian berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ, tanggal 9 Mei 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Kajian ini memperlihatkan sejauh mana pemerintah daerah mempublikasikan informasi anggaran melalui *website* resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan (Juli – Agustus 2014) pada 505 *website* resmi pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil dari kajian ini digunakan untuk memberikan nilai terhadap kualitas pengelola dalam menyediakan informasi anggaran daerah di *website* resmi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa 434 pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki *website* yang bisa diakses dengan baik, 56 mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses dan 8 belum memiliki nama domain (go.id). Dari seluruh *website* yg tersedia, hanya 123 yang sudah menyediakan informasi, namun belum ada satupun yang menampilkan data mutakhir dengan lengkap sesuai instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012.

Penelurusan selanjutnya yaitu aspek keberadaan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Mengacu kepada 434 *website* yang dapat diakses tersebut, diperoleh 123 *website* yang terdiri dari 56 yang menyediakan menu dengan nama yang sesuai dan 67 dengan nama yang kurang sesuai. Perolehan lain yaitu 143 *website* hanya menyediakan menu saja namun didalamnya tidak tersedia informasi atau bahkan sama sekali tidak bisa diakses. Temuan lain yaitu 168 *website* tidak menyediakan menu sama sekali untuk mengakses informasi anggaran daerah.

Aspek penilaian terhadap ketersediaan data anggaran tahun 2013 menunjukkan hanya Pemerintah Kota Solok di provinsi Sumatera Barat yang menampilkan informasi dengan lengkap. Sisanya tidak menyediakan data dengan lengkap, bahkan ada *website* yang tidak menyediakan data sama sekali. Aspek lain yaitu penilaian terhadap aspek presentasi penyajian hanya Pemerintah Kota Ambon yang menyajikan informasi anggaran dalam bentuk infografis, sedangkan 95% dalam format PDF yang bisa diunduh dan 4% hanya dalam format tabel.

Konteks Kajian

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Pasal ini pun mengamanatkan bahwa kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Butir ke 45 yang tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17/2011 menjelaskan tentang rencana aksi Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kemendagri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut.

Untuk menindaklanjuti UU No 14 Tahun 2008 dan Inpres No. 17/2011, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri tersebut memandatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam *website* resmi pemerintah dan mempublikasikan data mutakhir pada menu konten tersebut.

Kajian Terbatas

Tim kajian merancang alat penilaian untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menyediakan informasi pengelolaan anggaran daerah di *website* pemerintah daerah sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Kajian dilakukan dalam metodologi penilaian berjenjang dan bersyarat dalam tiga tahap, yaitu:

1. Memberikan penilaian terhadap aspek keberadaan *website* Pemerintah daerah sebagai media yang digunakan untuk mempublikasikan informasi
2. Penilaian atas aspek ketersediaan menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di *website* pemerintah daerah tersebut
3. Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dan kelengkapan data mutakhir di dalam menu tersebut mengacu kepada instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012. Menilai ketersediaan data di tahun sebelumnya untuk mengukur sejauh mana konsistensi pemerintah daerah dalam menyediakan informasi anggaran daerah. Selain itu juga melakukan penilaian terhadap presentasi penyajian informasi anggaran daerah untuk mengukur tingkat kesulitan informasi tersebut untuk diakses dan dimengerti oleh masyarakat.

KONTEKS

Transparansi Informasi Anggaran Daerah di Era Digital

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 71,19 juta¹. Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan *website* menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran informasi. Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi kepada warga. Oleh karenanya perbaikan terhadap kualitas konten menjadi keharusan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap warga, termasuk di dalamnya adalah penyajian informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah.

Kajian ini dimaksudkan agar dapat memberikan potret penyediaan informasi anggaran daerah dengan tujuan akhir mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan dana pembangunan pemerintah. Selain itu, warga didorong untuk dapat memahami seberapa besar alokasi dana yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Terbukanya akses informasi sendiri merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Beberapa perbaikan harus dilakukan, mulai dari pembenahan keberadaan *website* agar dapat diakses dengan baik hingga penyajian menu dan kelengkapan penyajian informasi itu sendiri. Peningkatan kualitas penyajian informasi anggaran diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami masyarakat luas.

Perkembangan penggunaan *website* oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001. Instruksi tersebut membahas Pengembangan dan Ppndayagunaan telematika di Indonesia, kemudian diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*.

Inpres No. 3 Tahun 2003 menjabarkan dengan jelas tahapan di bagian strategi Pengembangan *E-Government*. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan *website* tercantum dalam butir 18 yang mendeskripsikan strategi keenam (Tabel 1).

¹ <http://www.apjii.or.id/v2/read/article/apjii-at-media/223/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-terus-meningka.html>

Tabel 1. Tingkatan-tingkatan dalam pengembangan *e-government*

Tingkat 1: Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pembuatan situs informasi disetiap lembaga ~ Penyiapan SDM ~ Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll ~ Sosialisasi situs untuk internal maupun untuk publik
Tingkat 2: Pematangan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pembuatan situs informasi publik interaktif ~ Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
Tingkat 3: Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pembuatan situs transaksi pelayanan publik ~ Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4: Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. ~ Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, maka diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Langkah menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan. Tidak hanya menimbulkan pemborosan, namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> – Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di atas. – Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah (<i>information security</i>), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat (<i>privacy</i>). – Persyaratan sistem manajemen, proses kerja dan sumber daya manusia, ketiganya diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.

Pada bulan Mei 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya mengamanatkan setiap badan publik wajib untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk memperoleh informasi publik, terkecuali beberapa informasi tertentu yang menyangkut ketahanan negara.

Pasal 9 UU No.14/2008 ini mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, dan salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Pasal ini pun menyebutkan bahwa penyebaran informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut mengamanatkan upaya pencegahan korupsi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Butir ke 45 Strategi Pencegahan, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17/2011 menjelaskan tentang rencana aksi, yaitu Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kemendagri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Keluaran dari aksi tersebut adalah jumlah publikasi data mutakhir (APBD, RAPBD, RKA SKPD, DPA SKPD, LKPD) dari pemerintahan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Laporan realisasi anggarannya akan dilakukan melalui *website* nasional Kemendagri dan masing-masing Pemda.

Untuk menindaklanjuti Inpres No. 17/2011, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaannya. Instruksi Mendagri memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi pemerintah provinsi yang terdiri dari 12 items data mutakhir (Tabel 2).

Diktum Keempat Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk melakukan hal sebagai berikut :

- a) Menyediakan sarana dalam bentuk *website* resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi yang belum memiliki *website* resmi dan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”, diwajibkan paling lambat tanggal 31 Mei 2012.
- b) Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki *website* resmi, diinstruksikan agar menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” paling lambat tanggal 31 Mei 2012.

Selanjutnya, Diktum Kelima dan Keenam adalah mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Didalam konten tersebut meliputi:

- a) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

- b) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- c) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- e) Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Desember 2013². Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia (tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta) adalah sebanyak 505 yang terdiri dari 412 Kabupaten dan 93 Kota. Untuk mengetahui sejauh mana instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 dijalankan oleh 505 pemerintah kabupaten/kota, maka dibutuhkan adanya kajian terhadap keberadaan *website* resmi pemerintah kabupaten/kota.

²http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_konten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf

KAJIAN

Rancangan Kajian

Hambatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam pengawasan APBD selama ini adalah ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi anggaran daerah. Masih cukup banyak pemerintah daerah yang tidak atau belum mempublikasikan informasi anggaran daerah sesuai dengan Instruksi Mendagri. Bahkan masih ada beberapa pemerintah kabupaten/Kota yang belum memiliki *website* resmi.

Transparansi informasi anggaran daerah wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung upaya pengawasan APBD oleh publik dengan terencana, terarah dan efektif. Warga berhak untuk mengetahui konsistensi antara perencanaan dan realisasi terhadap APBD. Selain itu, masyarakat perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kepentingan publik sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran. Manfaat yang berarti bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat ketika anggaran dialokasikan dengan tepat.

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

- a) Menilai kapasitas 505 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam penyediaan informasi anggaran daerah pada *website* resmi
- b) Menganalisis potret penyajian informasi anggaran dalam skala nasional maupun skala provinsi

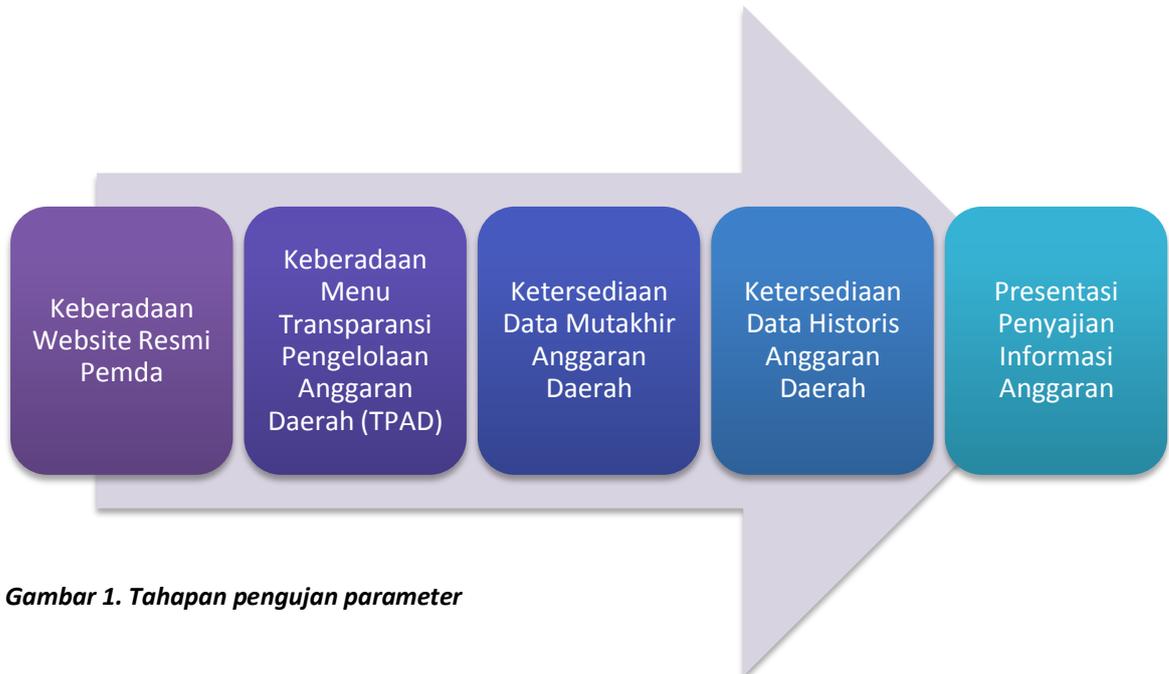
Batasan

Studi ini dilakukan selama kurun waktu dua bulan dengan mengakses 505 *website* resmi milik pemerintah kabupaten/kota di Seluruh Indonesia, tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi Jakarta.

Metodologi

Studi ini bertujuan untuk melihat kualitas penyajian informasi anggaran daerah oleh pemerintah kabupaten/kota melalui *website* resmi masing-masing. Pembuatan beberapa parameter dari sisi pemerintah kabupaten/kota sebagai penyaji informasi untuk mengukur penyajian informasi anggaran daerah yang tersebut. Parameter didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Selain itu, terdapat parameter tambahan dari sisi masyarakat sebagai yang disajikan (*user*). Parameter tersebut adalah:

1. Keberadaan *Website* Resmi Pemerintah Daerah
2. Keberadaan Menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”
3. Ketersediaan data terbaru (mutakhir)
4. Ketersediaan data di tahun sebelumnya
5. Presentasi Penyajian Informasi Anggaran



Gambar 1. Tahapan pengujian parameter

Pembobotan Parameter Penilaian

Setelah menentukan parameter penilaian maka diklasifikasikan berdasarkan bobot, kriteria dan nilai dari masing-masing parameter tersebut. Penentuan bobot pada masing-masing parameter didasarkan atas pertimbangan oleh tim peneliti dengan keutamaan dan urgensinya. Tiga parameter pertama yang telah disebutkan sebelumnya adalah parameter utama seperti tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ. Sehingga bobot ketiga parameter ini dibuat dengan nilai yang setara dan paling besar. Bobot penilaian sebesar 25% diberikan pada *website* yang dapat diakses dengan baik, memiliki menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”, ditambah ketersediaan data terbaru (mutakhir).

Parameter mengenai ketersediaan data tahun sebelumnya diberikan bobot 10%.—Pertimbangannya adalah ketersediaan data anggaran daerah dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan informasi yang komprehensif. Tersediannya data tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan anggaran daerah.

Sedangkan pada parameter terakhir yaitu persentasi penyajian informasi anggaran daerah memiliki bobot 15%. Koinfo dalam Praja (2009) menjelaskan bahwa salah satu parameter yang digunakan dalam menilai website pemerintah adalah kemudahan untuk dibaca. Sebagai salah satu media penyaji informasi yang berisi agenda dan pencapaian kinerja pemerintah, website harus memperhatikan faktor kenyamanan dan memberikan kemudahan bagi pengunjung pada saat mengaksesnya.

Kriteria dan Skor Parameter

Dari setiap parameter penilaian, penulis menentukan kriteria dan skor dari masing-masing kriteria dengan rentang nilai dari 5 sampai 20. Kriteria parameter keberadaan *website* resmi pemerintah daerah adalah :

- a) Adanya alamat web resmi pemerintah dengan ekstensi domain (go.id); Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang *website* resmi pemerintah daerah harus menggunakan ekstensi domain (go.id). Sehingga dalam riset ini, *website* pemerintah dengan ekstensi domain selain go.id tidak dianggap sebagai *website* resmi pemerintah
- b) Halaman *website* dapat diakses dengan baik tanpa gangguan; Ketetapan UN-ASPA mengenai standar bagi satu negara dalam mengembangkan E-Government yang baik. Tahap awal yang harus dilakukan oleh satu negara adalah *Emerging Web Presence*, atau keberadaan *website* yang dapat diakses dengan baik oleh masyarakat
- c) *Website* menampilkan informasi publik; Menurut Ayunigntyas (2014), *website* pemerintah harus mudah digunakan. Pengunjung dapat menemukan data dan informasi yang mereka perlukan dengan mudah. Selanjutnya dapat melakukan download dengan cepat dan mengetahui kapan pengunjung selesai melakukannya, serta dapat dengan mudah memberitahukan atau mengirim isi bersangkutan kepada orang lain.

Parameter Keberadaan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Kesesuaian nama menu konten dengan yang disyaratkan yaitu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”
- b) Ketersediaan menu atau *banner* khusus yang merupakan jalan pintas (*shortcut*) ke halaman konten dengan nama atau gambar “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”
- c) Ketersediaan Menu atau *banner* yang bisa diklik (tidak *broken link*) dan informasi anggaran daerah bisa diklik atau diunduh.

Parameter penilaian ketersediaan data terbaru (mutakhir) dan data pada tahun sebelumnya dapat menjelaskan kelengkapan dokumen anggaran daerah yang diunggah pada *website* pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang pemerintah kabupaten/kota diharuskan mengunggah dokumen anggaran daerah pada *website* resmi (tabel 2).

Tabel 2. Parameter penilaian ketersediaan data terbaru

No	Konten
1	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
2	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
8	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
9	Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
10	Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
11	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kelengkapan dokumen anggaran daerah tahun berjalan (2014) adalah 10 dokumen, tanpa laporan keuangan pemerintah daerah dan opini badan pemeriksa keuangan. Hal tersebut dikarenakan kedua dokumen tersebut baru bisa tersedia setelah tutup buku pada akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk kelengkapan dokumen pada tahun sebelumnya adalah 12 dokumen.

Parameter penilaian terakhir adalah presentasi penyajian informasi anggaran daerah. Parameter ini merupakan syarat yang ditambahkan oleh penulis sebagai salah satu cara menilai kemudahan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengunjung *website*. Presentasi yang dinilai adalah ketersediaan informasi dalam bentuk atau format grafik, Infografik, dan PDF (*Portable Document Format*) yang bisa diunduh.

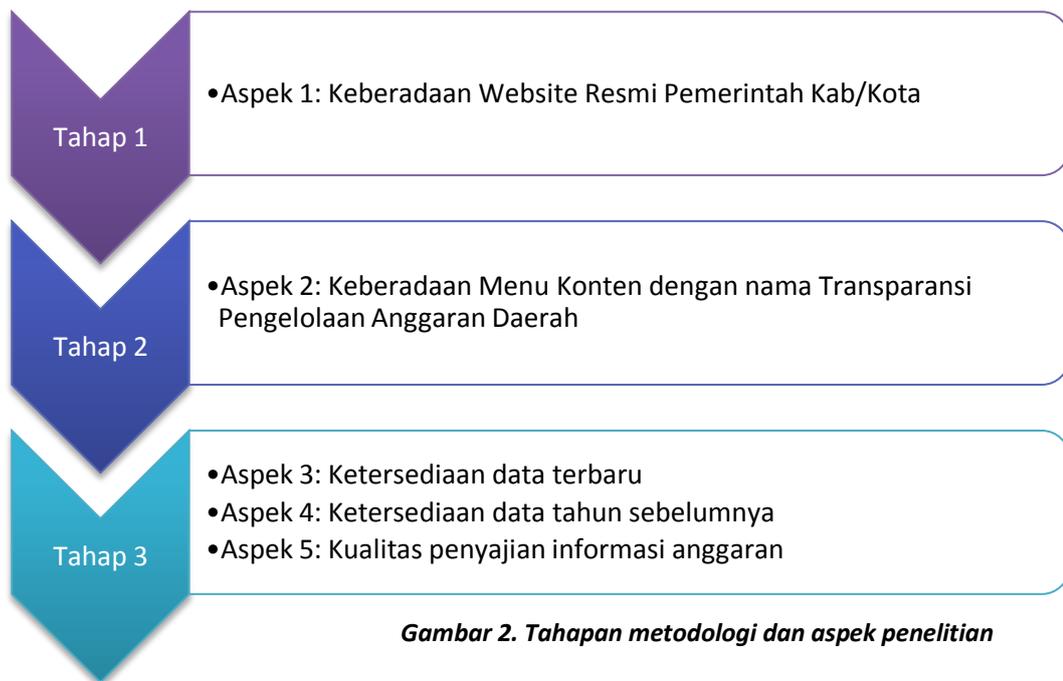
Tabel 3. Pembobotan, Kriteria dan Skor dari masing-masing parameter

Aspek	Bobot	Kriteria dan skor			
		20	15	10	5
Keberadaan <i>Website</i> Resmi Pemerintah Daerah	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Ada alamat resmi go.id • <i>Website</i> bisa diakses dengan baik (tidak ada gangguan) • Menampilkan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada alamat resmi go.id • <i>Website</i> bisa diakses dengan baik namun tidak menampilkan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada alamat resmi go.id • <i>Website</i> tidak bisa diakses dengan baik atau mengalami gangguan 	Tidak Ada Alamat Resmi go.id
Keberadaan Menu Konten dengan Nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Menu dan informasi nama menunya sesuai • Tersedia Menu/Banner dengan Nama yang sesuai “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”, • Menu bisa diklik dan tersedia informasi anggaran yang bisa di klik 	<p>Ada Menu dan informasi namun namanya kurang sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Menu/Banner dengan Nama yang kurang sesuai, misal “Transparansi Anggaran, Informasi Anggaran”, • Menu bisa diklik dan tersedia informasi anggaran yang bisa di klik 	<p>Hanya Ada Menu namun tidak ada informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Menu/Banner dengan Nama yang sesuai ataupun kurang sesuai • Menu bisa diklik Tapi tidak ada Informasi anggaran didalamnya atau Menu tidak bisa di klik sama sekali 	Tidak tersedia menu sama sekali
Ketersediaan Data Terbaru (Mutakhir)	25%	Data terbaru untuk tahun berjalan tersedia dan lengkap (10 item)	Data terbaru untuk tahun berjalan tersedia (6-9 item)	Data terbaru untuk tahun berjalan tersedia (1-5 item)	Tidak ada data sama sekali
Ketersediaan Data Tahun Sebelumnya	10%	Data untuk tahun sebelumnya tersedia dan lengkap (12 item)	Data untuk tahun sebelumnya tersedia 7-11 item	Data untuk tahun sebelumnya tersedia 1-6 item	Tidak ada data sama sekali
Presentasi Penyajian Informasi Anggaran	15%	Data Tersaji dalam format <ul style="list-style-type: none"> • PDF yang bisa diunduh • Tersedia grafik • Tersedia Infografis 	Hanya tersedia grafik dan PDF yang dapat diunduh	Hanya tersedia PDF yang dapat diunduh	Hanya ada tabel
Total	100 %				

HASIL

Dari 505 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, hanya 24% atau sejumlah 123 website Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

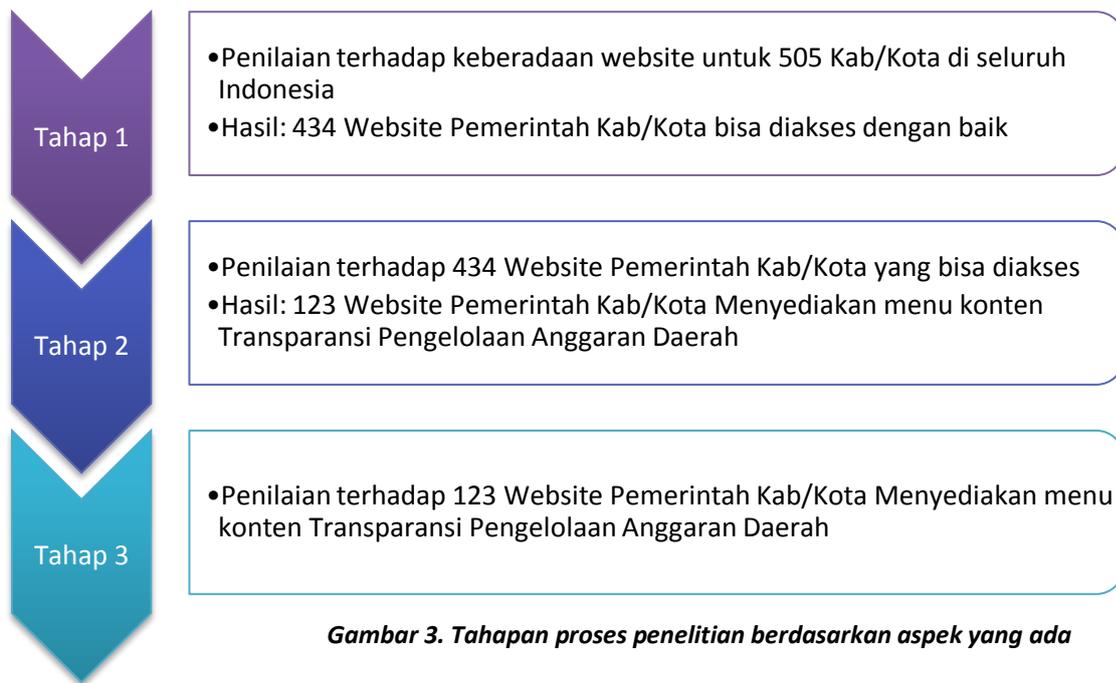
Hasil kajian dengan menggunakan 5 aspek penilaian sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam kajian ini memperlihatkan hasil seleksi dalam 3 tahap seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. Tahapan metodologi dan aspek penelitian

Tahapan diatas menunjukkan penilaian berjenjang, dimana pengukuran terhadap aspek 2 bisa dilakukan ketika *website* pemerintah kabupaten/kota bisa diakses dengan baik. Sedangkan penilaian terhadap aspek 3, 4 dan 5 baru dapat dilakukan ketika menu konten dan informasi pengelolaan anggaran daerah tersedia di *website* pemerintah kabupaten/kota.

Hasil kajian secara umum menunjukkan, dari 505 Kabupaten/Kota, 86% atau sejumlah 434 website pemerintah kabupaten/kota bisa diakses dengan baik. Dari 434 website pemerintah kabupaten/kota tersebut, 28 % atau sejumlah 123 website Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dalam skala nasional, dari 505 kabupaten/kota baru 123 kabupaten/kota atau 24% yang menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.



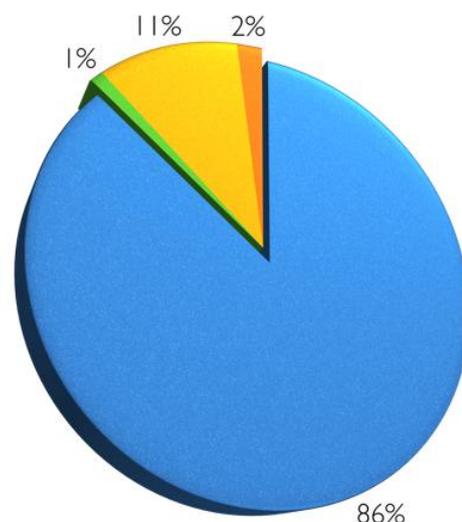
Aspek 1: Keberadaan Website Resmi Pemerintah Daerah

Hasil dari kajian ini digunakan untuk memberikan skor terhadap penyediaan informasi pengelolaan anggaran daerah di *website* resmi pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelusuran terhadap keberadaan 505 *website* yang dilakukan dari bulan Juli hingga Agustus tahun 2014 menunjukkan bahwa 2% atau sebanyak 8 pemerintah daerah belum memiliki nama domain (*go.id*). Hampir semua pemerintah daerah ini merupakan kabupaten/kota pemekaran yang baru disahkan pada tahun 2012 dan 2013.

Keberadaan Website Pemerintah Daerah

Jumlah total 505 Kab/kota

- Ada alamat resmi (*go.id*), website dapat diakses dengan baik (tidak ada gangguan) dan menampilkan informasi publik
- Ada alamat resmi (*go.id*), website dapat diakses dengan baik (tidak ada gangguan) namun tidak menampilkan informasi publik
- Ada alamat resmi (*go.id*), namun *website* tidak dapat diakses
- Tidak ada alamat resmi (*go.id*)

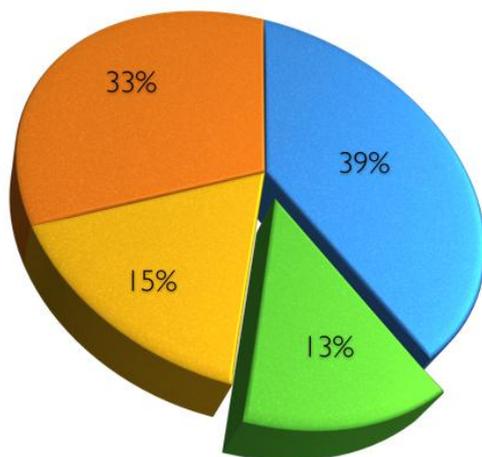


Gambar 4. Diagram keberadaan website pemerintah daerah

Temuan berikutnya adalah 12% atau sebanyak 63 *website* pemerintah daerah mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses. Dari 63 *website* tersebut, 7 *website* sedang dalam masa pemeliharaan/*maintenance*, dan 56 *website* mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Sementara itu 86% atau sebanyak 434 pemerintah daerah telah memiliki *website* yang bisa diakses dengan baik.

Aspek 2: Keberadaan Menu Konten dengan Nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”

Dari 434 *website* pemerintah kabupaten/kota yang bisa diakses, 13% atau sejumlah 56 *website* pemerintah kabupaten/kota telah menyediakan menu konten sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ yaitu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Dalam menu tersebut menyediakan informasi pengelolaan anggaran daerah. Selanjutnya 15% atau sejumlah 67 *website* pemerintah kabupaten/kota menyediakan menu konten dengan nama menu kurang sesuai, namun di dalamnya menyediakan informasi pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu 33% atau sejumlah 143 *website* pemerintah kabupaten/kota hanya menyediakan menu namun tidak ada informasi pengelolaan anggaran daerah yang tersedia. Terakhir yaitu 39% atau sejumlah 168 *website* pemerintah kabupaten/kota tidak menyediakan menu sama sekali. Melihat dari hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap aspek 3 hanya bisa dilakukan untuk 123 *website* pemerintah kabupaten/kota.



Keberadaan Menu Konten dengan Nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”

Jumlah total 434 Kab/kota

- Ada menu dan informasi nama menu yang sesuai
- Ada menu dan informasi namun nama kurang sesuai
- Hanya ada menu namun tidak ada informasi
- Tidak tersedia menu sama sekali

Gambar 5. Keberadaan menu konten

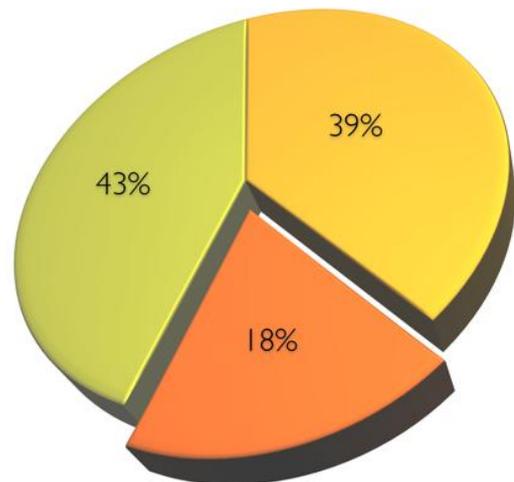
Aspek 3: Ketersediaan Data Terbaru (Mutakhir)

Dari 123 *website* Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, dengan nama menu yang sesuai maupun kurang sesuai. Tidak ada satupun *website* pemerintah kabupaten/kota yang menyajikan data terbaru di tahun berjalan (tahun 2014) secara lengkap sebanyak 10 item. Diperoleh 18% atau sejumlah 22 *website* pemerintah kabupaten/kota menampilkan data terbaru sebanyak 6 sampai dengan 9 item, 43% atau sejumlah 53 *website* pemerintah kabupaten/kota menampilkan data terbaru sebanyak 1 sampai dengan 5 item, dan 39% atau sejumlah 48 *website* pemerintah kabupaten/kota tidak menyediakan data terbaru sama sekali.

Ketersediaan Data Terbaru (Mutakhir)

Jumlah total 123 Kab/kota

- Data terbaru untuk tahun berjalan tersedia dan lengkap (6-9 item)
- Data terbaru untuk tahun berjalan tersedia dan lengkap (1-5 item)
- Tidak ada data sama sekali



Gambar 6. Ketersediaan data terbaru (Mutakhir)

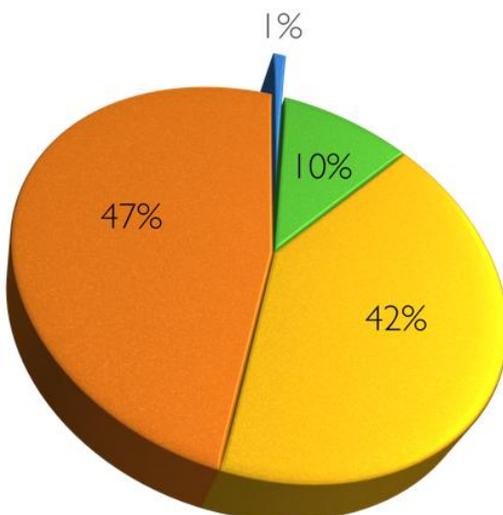
Aspek 4: Ketersediaan Data Tahun Sebelumnya

Dari 123 *website* pemerintah kabupaten/kota yang menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dengan nama menu yang sesuai maupun kurang sesuai, hanya Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat (1%) yang menyajikan data di tahun sebelumnya (tahun 2014) secara lengkap sebanyak 12 item. Sementara itu 10% atau sejumlah 12 *website* pemerintah kabupaten/kota menampilkan data tahun 2013 sebanyak 7 sampai dengan 11 item. 47% atau sejumlah 58 *website* pemerintah kabupaten/kota menampilkan data tahun 2013 sebanyak 1 sampai dengan 6 item. 42% atau sejumlah 52 *website* pemerintah kabupaten/kota tidak menyediakan data tahun 2013 sama sekali.

Ketersediaan Data Tahun Sebelumnya

Jumlah total 123 Kab/kota

- Data terbaru untuk tahun sebelumnya tersedia lengkap (12 item)
- Data terbaru untuk tahun sebelumnya tersedia sebanyak 7-11 item
- Data terbaru untuk tahun sebelumnya tersedia Sebanyak 1-6 item
- Tidak ada sama sekali



Gambar 7. Ketersediaan data tahun sebelumnya

Aspek 5: Kualitas Penyajian Informasi Anggaran

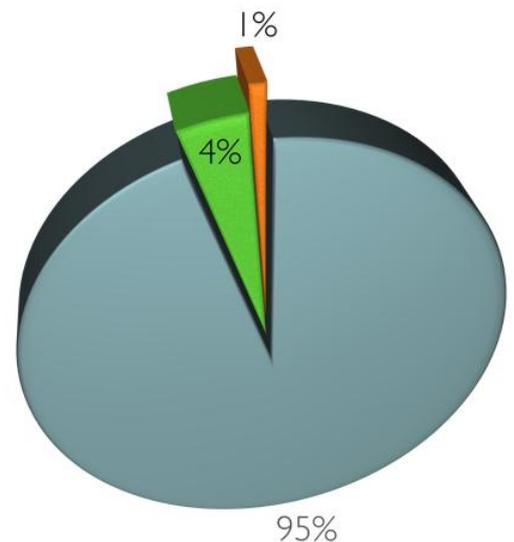
Dari 123 website Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, hanya Pemerintah Kota Ambon (1%) yang menyajikan informasi anggaran dalam format infografis dan juga PDF yang bisa diunduh. Sementara itu 95% atau sejumlah 117 *website* pemerintah kabupaten/kota menampilkan data dalam format PDF yang bisa diunduh. Sebanyak 4% atau sejumlah 5 *website* pemerintah kabupaten/kota menyediakan data dalam format tabel namun tidak ada PDF yang bisa diunduh.

Kualitas Penyajian Informasi Anggaran

Jumlah total 123 Kab/kota

- Data tersaji dalam format grafik, infografis dan format PDF yang dapat diunduh
- Data tersaji hanya dalam format PDF yang dapat diunduh
- Data tersaji hanya dalam format tabel tanpa format PDF yang dapat diunduh

Gambar 8. Kualitas penyajian informasi anggaran





Pemerintah Kota Ambon



- Profil
- Mengenal Ambon
- Investasi
- Open-Government
- Informasi
- Hubungi Kami
- Gallery

Open Budget

Transparansi Pengelola Anggaran Daerah

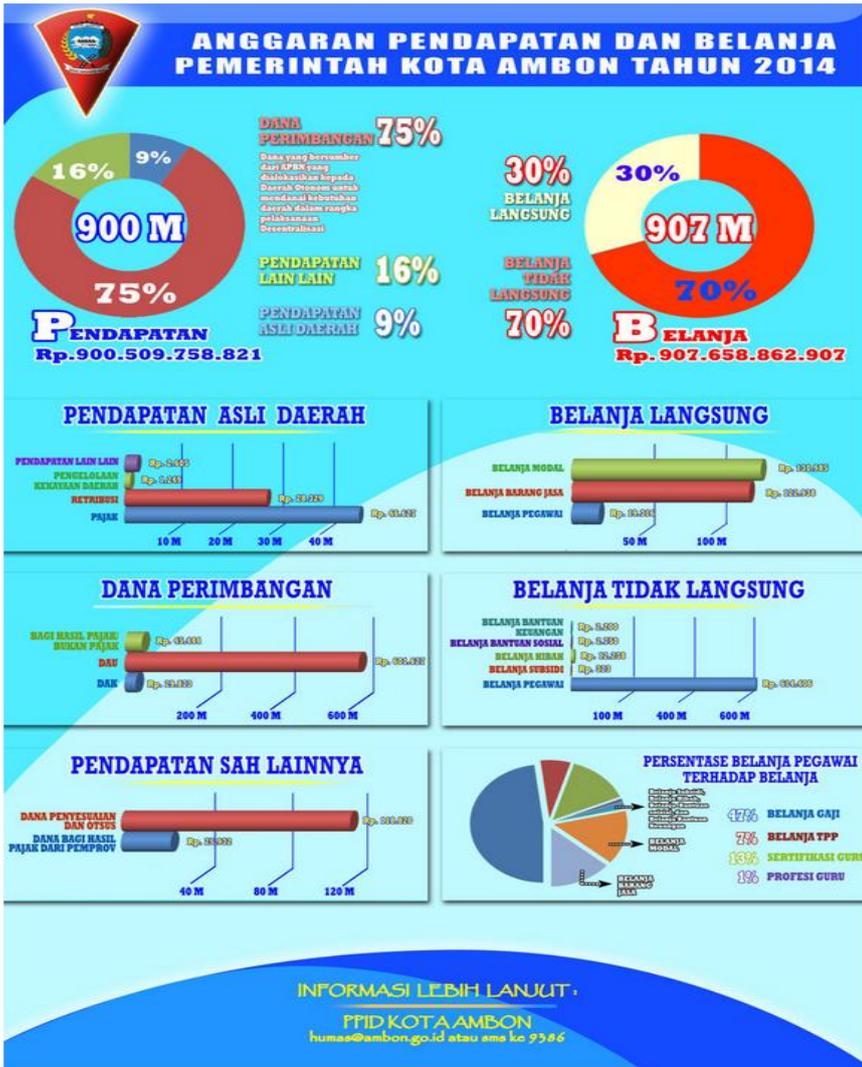
2014

APBD

Ringkasan APBD

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi – Lampiran II SKPD

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan PROGNOSIS 6 (enam) Bulan



- 2013
- 2012
- 2011

Informasi

Darwin Ambon Yacht Race & Rally 2014



- Info Cuaca
- Info Sembako

Pengunjung Situs

059701

- Visit Today : 110
- Visit Yesterday : 0
- This Month : 110
- Total Visit : 59701
- Hits Today : 259

September 2014

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

« Aug

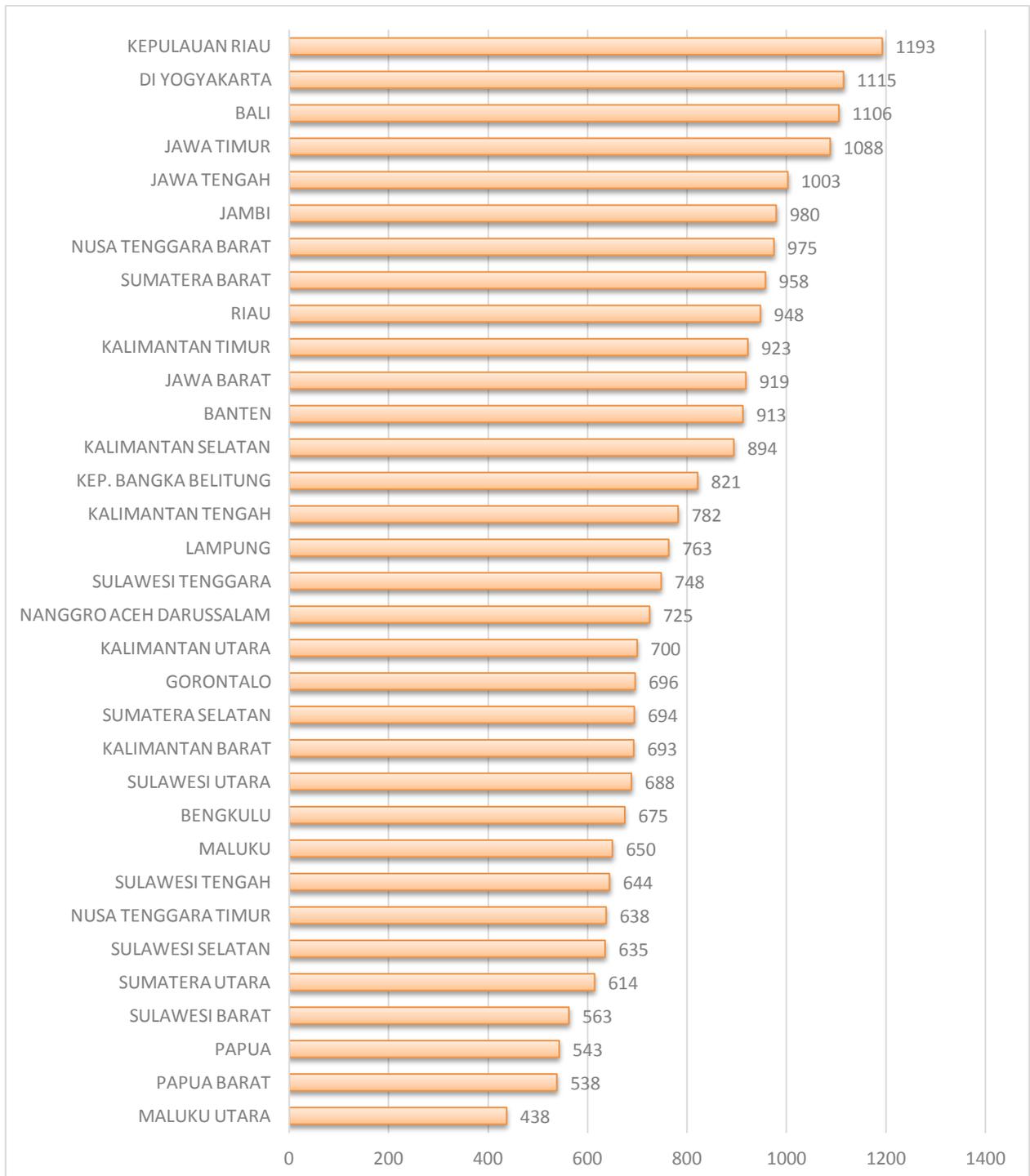
Arsip Berita

Select Month

Gambar 9. Tampilan informasi anggaran dalam bentuk infografis di website Pemerintah Kota Ambon

Rata-Rata Nilai per-Provinsi

Berdasarkan nilai rata-rata di tiap provinsi, provinsi Kepulauan Riau menempati urutan pertama diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Sedangkan provinsi dengan nilai rata-rata terendah adalah Maluku Utara diikuti oleh Papua Barat dan Papua.



Gambar 10. Tabel rata-rata nilai per-Provinsi

15 Website Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik

Berikut ini adalah 15 *website* pemerintah kabupaten/kota yang memiliki nilai total tertinggi:

Tabel 4. 15 Website pemerintah kabupaten/kota dengan nilai terbaik

No	Kabupaten/kota	Skor					Total
		Keberadaan <i>website</i> resmi	Keberadaan Menu Tpad	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	
1	Kota Palembang	500	500	375	150	150	1675
2	Kab. Kep. Anambas	500	500	375	150	150	1675
3	Kab. Jombang	500	500	375	150	150	1675
4	Kota Blitar	500	500	375	150	150	1675
5	Kab. Lamandau	500	500	375	150	150	1675
6	Kab. Pesisir Selatan	500	500	375	100	150	1625
7	Kab. Indragiri Hulu	500	500	375	100	150	1625
8	Kab. Kampar	500	500	375	100	150	1625
9	Kab. Bangka	500	500	375	100	150	1625
10	Kab. Bojonegoro	500	500	375	100	150	1625
11	Kota Pasuruan	500	500	375	100	150	1625
12	Kota Solok	500	375	375	200	150	1600
13	Kota Bukit Tinggi	500	500	375	50	150	1575
14	Kab. Cilacap	500	500	375	50	150	1575
15	Kota Magelang	500	500	375	50	150	1575

CATATAN

Pasca reformasi, telah tumbuh kesadaran kuat warga mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Transparansi kebijakan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, telah menjadi sebuah prasyarat dari terwujudnya demokrasi di Indonesia. Salah satu tema yang menjadi tolak ukur adalah terbukanya informasi pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Penyajian data anggaran pembangunan daerah yang lengkap dan mudah dipahami dapat mendorong masyarakat mengerti tentang pengalokasian dan kinerja pengelolaan anggaran pembangunan di wilayah mereka masing-masing.

Salah satu wujud transparansi informasi publik adalah penyajian informasi melalui *website* resmi pemerintah daerah. Jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Ke depan dunia maya akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga.

Pemerintah pusat mendorong keterbukaan informasi bagi warga dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 UU No.14/2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.

Bermula dari niatan untuk mendorong terbangunnya demokrasi yang sehat. Penabulu Alliance berinisiatif melakukan kajian dengan obyek penelitian terdiri dari seluruh *website* resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Tidak termasuk didalamnya 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 505 *website* yang terdiri dari 412 Kabupaten dan 93 Kota dipantau dan dikaji selama kurun waktu dua bulan.

Secara singkat, hasil dari penelitian menggambarkan masih ada 2% pemerintah kabupaten/kota yang belum menggunakan domain .go.id. Dari 434 *website* pemerintah kabupaten/kota yang bisa diakses, 13% atau sejumlah 56 *website* pemerintah kabupaten/kota telah menyediakan menu konten sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ yaitu menu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD).

Sementara itu, 33% atau sejumlah 143 *website* pemerintah kabupaten/kota hanya menyediakan menu tersebut namun tidak ada informasi pengelolaan anggaran daerah yang tersedia di dalam menu tersebut. Dan 39% atau sejumlah 168 *website* pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak menyediakan menu TPAD.

Beberapa temuan kajian dan penggambaran kondisi di atas memberikan pesan khusus bahwa masih terdapat kelemahan mendasar dalam tata kelola *website* resmi pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh adalah kondisi ketidakseragaman pola penamaan domain *website* resmi pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas pengelolaan, pengembangan panduan pengelolaan *website* pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang mendasar dan mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, temuan berikutnya adalah bahwa aturan dan kebijakan yang mendorong terbangunnya saluran dan akses informasi publik belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Keterbukaan informasi publik, terutama pada aspek penyajian informasi anggaran pembangunan belum dirasakan menjadi kewajiban mendasar bagi pemerintah daerah. Ketiadaan sanksi hukum tertentu membuat peraturan pemerintah pusat hanya bersifat sebagai anjuran belaka. Di sisi lain, warga pun memiliki kepedulian terhadap pentingnya informasi tersebut bagi hajat hidup mereka.

Hanya satu kota, yaitu Kota Ambon, yang berusaha menyajikan informasi anggaran pembangunan dalam bentuk infografis. Hanya satu kota, yaitu Kota Solok yang menampilkan secara lengkap keseluruhan item informasi untuk tahun 2013, sesuai Instruksi Mendagri terkait, dan tidak ada satupun kabupaten/kota yang menampilkannya secara lengkap di tahun 2014.

Kajian ini adalah potret dan gambaran awal kondisi penyajian informasi publik mengenai kinerja pengelolaan anggaran pembangunan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Kajian ini masih perlu dikembangkan untuk menilai sejauh mana akses warga terhadap informasi publik mengenai kinerja pengelolaan anggaran pembangunan pemerintah kabupaten/kota tersebut benar-benar sudah terjamin dan dapat terpenuhi. Akses warga tersebut harus dapat dinilai dari sejauh mana informasi tersebut disajikan dalam bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dipahami; dan juga sejauh mana kapasitas dan kemampuan pemahaman dimiliki oleh warga atas informasi yang telah tersajikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Lebih dari 5 tahun terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, situasi terkini ternyata masih begitu jauh dari ideal. Perlu kesadaran mendasar dan perubahan paradigma dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku aktif pembangunan, melalui *social participation* (keikutsertaan warga dalam pemerintahan), *social responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga), *social support* (dukungan warga terhadap jalannya pemerintah) dan *social control* (kontrol warga terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

LAMPIRAN

HASIL PENILAIAN KESELURUHAN

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
1	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	palembang.go.id	500	500	375	150	150	1675
2	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	KEPULAUAN RIAU	anambaskab.go.id	500	500	375	150	150	1675
3	KAB. JOMBANG	JAWA TIMUR	jombangkab.go.id	500	500	375	150	150	1675
4	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	blitarkota.go.id	500	500	375	150	150	1675
5	KAB. LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	lamandaukab.go.id	500	500	375	150	150	1675
6	KAB. PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	pesisirselatankab.go.id	500	500	375	100	150	1625
7	KAB. INDRAGIRI HULU	RIAU	inhukab.go.id	500	500	375	100	150	1625
8	KAB. KAMPAR	RIAU	kamparkab.go.id	500	500	375	100	150	1625
9	KAB. BANGKA	KEP. BANGKA BELITUNG	bangka.go.id	500	500	375	100	150	1625
10	KAB. BOJONEGORO	JAWA TIMUR	bojonegorokab.go.id	500	500	375	100	150	1625
11	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	pasuruankota.go.id	500	500	375	100	150	1625
12	KOTA SOLOK	SUMATERA BARAT	solokkota.go.id	500	375	375	200	150	1600
13	KOTA BUKIT TINGGI	SUMATERA BARAT	bukittinggikota.go.id	500	500	375	50	150	1575
14	KAB. CILACAP	JAWA TENGAH	cilacapkab.go.id	500	500	375	50	150	1575
15	KOTA MAGELANG	JAWA TENGAH	magelangkota.go.id	500	500	375	50	150	1575
16	KAB. BINTAN	KEPULAUAN RIAU	bintankab.go.id	500	500	250	150	150	1550
17	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	bandung.go.id	500	375	375	150	150	1550
18	KAB. TEGAL	JAWA TENGAH	tegalkab.go.id	500	375	375	150	150	1550
19	KAB. BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	banjarkab.go.id	500	500	250	150	150	1550
20	KOTA AMBON	MALUKU	ambon.go.id	500	375	250	100	300	1525
21	KAB. MUARO JAMBI	JAMBI	muarojambi.go.id	500	500	250	100	150	1500
22	KAB. SOROLANGUN	JAMBI	sarolangunkab.go.id	500	500	250	100	150	1500
23	KAB. BANGKA TENGAH	KEP. BANGKA BELITUNG	bangkatengahkab.go.id	500	500	250	100	150	1500
24	KAB. NATUNA	KEPULAUAN RIAU	natonakab.go.id	500	375	375	100	150	1500
25	KAB. GARUT	JAWA BARAT	garutkab.go.id	500	500	250	100	150	1500
26	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	pekalongankota.go.id	500	375	375	100	150	1500
27	KAB. BANYUWANGI	JAWA TIMUR	banyuwangikab.go.id	500	500	250	100	150	1500
28	KAB. NGANJUK	JAWA TIMUR	nganjukkab.go.id	500	500	250	100	150	1500
29	KAB. TRENGGALEK	JAWA TIMUR	trenggalekkab.go.id	500	500	250	100	150	1500
30	KAB. TUBAN	JAWA TIMUR	http:tubankab.go.id	500	500	250	100	150	1500
31	KOTA TANGERANG	BANTEN	tangerangkota.go.id	500	500	250	100	150	1500
32	KAB. BANGLI	BALI	banglikab.go.id	500	500	250	100	150	1500
33	KAB. GIANYAR	BALI	gianyarkab.go.id	500	500	250	100	150	1500
34	KAB. PASAMAN	SUMATERA BARAT	pasamankab.go.id	500	375	375	50	150	1450
35	KAB. PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	pasamanbaratkab.go.id	500	500	250	50	150	1450
36	KAB. BUNGO	JAMBI	bungokab.go.id	500	500	250	50	150	1450
37	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	kotabogor.go.id	500	500	250	50	150	1450
38	KAB. KUNINGAN	JAWA BARAT	kuningankab.go.id	500	500	250	50	150	1450
39	KAB. SUKABUMI	JAWA BARAT	sukabumikab.go.id	500	500	250	50	150	1450
40	KAB. BREBES	JAWA TENGAH	brebeskab.go.id	500	500	250	50	150	1450
41	KAB. KUDUS	JAWA TENGAH	kuduskab.go.id	500	500	250	50	150	1450
42	KAB. BANTUL	DI YOGYAKARTA	bantulkab.go.id	500	500	250	50	150	1450
43	KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	madiunkota.go.id	500	500	250	50	150	1450
44	KAB. MOJOKERTO	JAWA TIMUR	mojokertokab.go.id	500	375	375	50	150	1450
45	KAB. SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	sukamarakab.go.id	500	500	250	50	150	1450
46	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	balikpapan.go.id	500	375	375	50	150	1450
47	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	kutaikartanegarakab.go.id	500	500	250	50	150	1450
48	KAB. KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	kolakakab.go.id	500	500	250	50	150	1450
49	KAB. PANDEGLANG	BANTEN	pandeglangkab.go.id	500	500	125	150	150	1425
50	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	mataramkota.go.id	500	375	250	150	150	1425
51	KOTA GORONTALO	GORONTALO	gorontalokota.go.id	500	375	250	150	150	1425
52	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	payakumbuhkota.go.id	500	375	250	100	150	1375
53	KOTA DUMAI	RIAU	dumaikota.go.id	500	500	125	100	150	1375
54	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	bandarlampungkota.go.id	500	500	125	100	150	1375

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
55	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	batamkota.go.id	500	500	125	100	150	1375
56	KAB. BANDUNG	JAWA BARAT	bandungkab.go.id	500	500	125	100	150	1375
57	KAB. BOGOR	JAWA BARAT	bogorkab.go.id	500	500	250	50	75	1375
58	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	bekasikota.go.id	500	375	250	100	150	1375
59	KAB. KEBUMEN	JAWA TENGAH	kebumenkab.go.id	500	375	250	100	150	1375
60	KAB. PEKALONGAN	JAWA TENGAH	pekalongankab.go.id	500	500	125	100	150	1375
61	KAB. PURWOREJO	JAWA TENGAH	purworejokab.go.id	500	375	250	100	150	1375
62	KAB. TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	temanggungkab.go.id	500	375	250	100	150	1375
63	KAB. KULON PROGO	DI YOGYAKARTA	kulonprogokab.go.id	500	500	125	100	150	1375
64	KOTA BATU	JAWA TIMUR	batukota.go.id	500	500	125	100	150	1375
65	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	surabaya.go.id	500	500	125	100	150	1375
66	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR	magetankab.go.id	500	375	250	100	150	1375
67	KAB. MALANG	JAWA TIMUR	malangkab.go.id	500	375	250	100	150	1375
68	KAB. SAMPANG	JAWA TIMUR	sampangkab.go.id	500	375	250	100	150	1375
69	KAB. JEMBRANA	BALI	jembranarakab.go.id	500	500	125	100	150	1375
70	KOTA DENPASAR	BALI	denpasarkota.go.id	500	375	250	100	150	1375
71	KAB. SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT	sumbawakab.go.id	500	375	250	100	150	1375
72	KAB. KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN	kotabarukab.go.id	500	375	250	100	150	1375
73	KAB. TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	tanahlautkab.go.id	500	500	125	100	150	1375
74	KOTA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	bontangkota.go.id	500	375	250	100	150	1375
75	KAB BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA	bulungan.go.id	500	500	125	100	150	1375
76	KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	manadokota.go.id	500	375	250	100	150	1375
77	KAB. ACEH UTARA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehutama.go.id	500	375	250	50	150	1325
78	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	pemkomedan.go.id	500	500	125	50	150	1325
79	KAB. MANDAILING NATAL	SUMATERA UTARA	madina.go.id	500	500	125	50	150	1325
80	KOTA CIREBON	JAWA BARAT	cirebonkota.go.id	500	375	250	50	150	1325
81	KAB. DEMAK	JAWA TENGAH	demakkab.go.id	500	500	125	50	150	1325
82	KAB. GROBOGAN	JAWA TENGAH	grobogan.go.id	500	375	250	50	150	1325
83	KAB. JEPARA	JAWA TENGAH	jeparakab.go.id	500	375	250	50	150	1325
84	KAB. SUKOHARJO	JAWA TENGAH	sukoharjokab.go.id	500	375	250	50	150	1325
85	KAB. BLITAR	JAWA TIMUR	blitarkab.go.id	500	375	250	50	150	1325
86	KAB. PONOROGO	JAWA TIMUR	ponorogo.go.id	500	375	250	50	150	1325
87	KAB. KARANGASEM	BALI	karangasemkab.go.id	500	375	250	50	150	1325
88	KAB. KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	kab-kupang.go.id	500	375	250	50	150	1325
89	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	banjarmasinkota.go.id	500	375	250	50	150	1325
90	KAB. BUTON	SULAWESI TENGGARA	butonkab.go.id	500	375	250	50	150	1325
91	KAB. SINJAI	SULAWESI SELATAN	sinjaikab.go.id	500	500	125	100	75	1300
92	KOTA BANDA ACEH	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	bandaacehkota.go.id	500	375	125	100	150	1250
93	KAB. PELALAWAN	RIAU	pelalawankab.go.id	500	375	125	100	150	1250
94	KAB. ROKAN HULU	RIAU	rokanhulukab.go.id	500	375	125	100	150	1250
95	KAB. OGAN ILIR	SUMATERA SELATAN	oganilirkab.go.id	500	375	125	100	150	1250
96	KOTA METRO	LAMPUNG	metrokota.go.id	500	375	125	100	150	1250
97	KAB. KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	kab-karimun.go.id	500	375	125	100	150	1250
98	KOTA YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	jogjakota.go.id	500	375	125	100	150	1250
99	KAB. SITUBONDO	JAWA TIMUR	situbondokab.go.id	500	375	125	100	150	1250
100	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	bimakota.go.id	500	375	125	100	150	1250
101	KAB. LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	lomboktimurkab.go.id	500	375	125	100	150	1250
102	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA	kendarikota.go.id	500	375	125	100	150	1250
103	KAB. BONE BOLANGO	GORONTALO	bonebolangokab.go.id	500	375	125	100	150	1250
104	KAB. MALUKU TENGGARA	MALUKU	malukutenggarakab.go.id	500	375	125	100	150	1250
105	KAB. ACEH SELATAN	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehselankab.go.id	500	375	125	50	150	1200
106	KAB. ACEH SINGKIL	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehsingilkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
107	KAB. NAGAN RAYA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	naganrayakab.go.id	500	375	125	50	150	1200
108	KOTA SUNGAI PENUH	JAMBI	sungaienuhkota.go.id	500	375	125	50	150	1200
109	KAB. TENGGAMUS	LAMPUNG	tanggamus.go.id	500	375	125	50	150	1200
110	KOTA CIMAHI	JAWA BARAT	cimahikota.go.id	500	375	125	50	150	1200
111	KAB. SRAGEN	JAWA TENGAH	sragenkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
112	KAB. LAMONGAN	JAWA TIMUR	lamongankab.go.id	500	375	125	50	150	1200

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
113	KAB. SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	sumbawabaratkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
114	KAB. SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	sikkakab.go.id	500	375	125	50	150	1200
115	KAB. PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	pontianakkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
116	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	kotimkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
117	KAB. PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	penajamkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
118	KAB. MINAHASA UTARA	SULAWESI UTARA	minutkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
119	KAB. LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	luwutimurkab.go.id	500	375	125	50	150	1200
120	KAB. KONAWE SELATAN	SULAWESI TENGGARA	konaweselatankab.go.id	500	375	125	50	150	1200
121	KAB. SAMOSIR	SUMATERA UTARA	samosirkab.go.id	500	375	125	50	75	1125
122	KAB. PASURUAN	JAWA TIMUR	pasuruankab.go.id	500	375	125	50	75	1125
123	KAB. LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	lomboktengahkab.go.id	500	375	125	50	75	1125
124	KAB. ACEH BARAT	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehbaratkab.go.id	500	250	0	0	0	750
125	KAB. ACEH TENGAH	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehtengahkab.go.id	500	250	0	0	0	750
126	KAB. PIDIE	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	pidiekab.go.id	500	250	0	0	0	750
127	KAB. PIDIE JAYA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	pidiejayakab.go.id	500	250	0	0	0	750
128	KOTA LANGSA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	langsakota.go.id	500	250	0	0	0	750
129	KOTA SABANG	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	sabangkota.go.id	500	250	0	0	0	750
130	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	SUMATERA UTARA	humbanghasundutankab.go.id	500	250	0	0	0	750
131	KAB. TOBA SAMOSIR	SUMATERA UTARA	tobasamosirkab.go.id	500	250	0	0	0	750
132	KAB. AGAM	SUMATERA BARAT	agamkab.go.id	500	250	0	0	0	750
133	KAB. DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	dharmasrayakab.go.id	500	250	0	0	0	750
134	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	SUMATERA BARAT	mentawaikab.go.id	500	250	0	0	0	750
135	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	padang.go.id	500	250	0	0	0	750
136	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT	padangpanjangkota.go.id	500	250	0	0	0	750
137	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT	pariamankota.go.id	500	250	0	0	0	750
138	KOTA SAWAH LUNTO	SUMATERA BARAT	sawahluntokota.go.id	500	250	0	0	0	750
139	KAB. PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	padangpariamankab.go.id	500	250	0	0	0	750
140	KAB. SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	sijunjung.go.id	500	250	0	0	0	750
141	KAB. SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	solselkab.go.id	500	250	0	0	0	750
142	KAB. TANAH DATAR	SUMATERA BARAT	tanahdatar.go.id	500	250	0	0	0	750
143	KAB. INDRAGIRI HILIR	RIAU	inhilkab.go.id	500	250	0	0	0	750
144	KAB. SIAK	RIAU	siakkab.go.id	500	250	0	0	0	750
145	KAB. BATANG HARI	JAMBI	batanghrikab.go.id	500	250	0	0	0	750
146	KOTA JAMBI	JAMBI	jambikota.go.id	500	250	0	0	0	750
147	KAB. MERANGIN	JAMBI	meranginkab.go.id	500	250	0	0	0	750
148	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	tanjabbarkab.go.id	500	250	0	0	0	750
149	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	JAMBI	tanjabtimkab.go.id	500	250	0	0	0	750
150	KAB. TEBO	JAMBI	tebokab.go.id	500	250	0	0	0	750
151	KAB. LAHAT	SUMATERA SELATAN	lahatkab.go.id	500	250	0	0	0	750
152	KAB. MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	muaraenimkab.go.id	500	250	0	0	0	750
153	KAB. MUSI BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	mubakab.go.id	500	250	0	0	0	750
154	KAB. OGAN KOMERING ILIR	SUMATERA SELATAN	kaboki.go.id	500	250	0	0	0	750
155	KAB. OKU TIMUR	SUMATERA SELATAN	okutimurkab.go.id	500	250	0	0	0	750
156	KAB. BENGKULU SELATAN	BENGKULU	bengkuluselatankab.go.id	500	250	0	0	0	750
157	KAB. BENGKULU TENGAH	BENGKULU	bengkulutengahkab.go.id	500	250	0	0	0	750
158	KAB. BENGKULU UTARA	BENGKULU	bengkuluutarakab.go.id	500	250	0	0	0	750
159	KOTA BENGKULU	BENGKULU	bengkulukota.go.id	500	250	0	0	0	750
160	KAB. MUKO- MUKO	BENGKULU	mukomukokab.go.id	500	250	0	0	0	750
161	KAB. REJANG LEBONG	BENGKULU	rejanglebongkab.go.id	500	250	0	0	0	750
162	KAB. SELUMA	BENGKULU	selumakab.go.id	500	250	0	0	0	750

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
163	KAB. LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	lampungselatankab.go.id	500	250	0	0	0	750
164	KAB. PESISIR BARAT	LAMPUNG	pesisirbaratkab.go.id	500	250	0	0	0	750
165	KAB. PRINGSEWU	LAMPUNG	pringsewukab.go.id	500	250	0	0	0	750
166	KAB. TULANG BAWANG	LAMPUNG	tulangbawangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
167	KAB. BANGKA BARAT	KEP. BANGKA BELITUNG	bangkabaratkab.go.id	500	250	0	0	0	750
168	KAB. BELITUNG TIMUR	KEP. BANGKA BELITUNG	belitungtimurkab.go.id	500	250	0	0	0	750
169	KAB. LINGGA	KEPULAUAN RIAU	linggakab.go.id	500	250	0	0	0	750
170	KAB. BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	bandungbaratkab.go.id	500	250	0	0	0	750
171	KAB. CIAMIS	JAWA BARAT	ciamiskab.go.id	500	250	0	0	0	750
172	KAB. CIREBON	JAWA BARAT	cirebonkab.go.id	500	250	0	0	0	750
173	KAB. INDRAMAYU	JAWA BARAT	indramayukab.go.id	500	250	0	0	0	750
174	KOTA DEPOK	JAWA BARAT	depok.go.id	500	250	0	0	0	750
175	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	tasikmalayakota.go.id	500	250	0	0	0	750
176	KAB. MAJALENGA	JAWA BARAT	majalengkakab.go.id	500	250	0	0	0	750
177	KAB. SUBANG	JAWA BARAT	subang.go.id	500	250	0	0	0	750
178	KAB. BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	banjarnegarakab.go.id	500	250	0	0	0	750
179	KAB. BATANG	JAWA TENGAH	batangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
180	KAB. BLORA	JAWA TENGAH	blorakab.go.id	500	250	0	0	0	750
181	KAB. KARANGANYAR	JAWA TENGAH	karanganyar.go.id	500	250	0	0	0	750
182	KAB. KENDAL	JAWA TENGAH	https://www.kendalkab.go.id	500	250	0	0	0	750
183	KAB. MAGELANG	JAWA TENGAH	magelangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
184	KAB. PATI	JAWA TENGAH	patikab.go.id	500	250	0	0	0	750
185	KAB. PEMALANG	JAWA TENGAH	pemalangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
186	KAB. PURBALINGGA	JAWA TENGAH	purbalinggakab.go.id	500	250	0	0	0	750
187	KAB. REMBANG	JAWA TENGAH	rembangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
188	KAB. WONOGIRI	JAWA TENGAH	http://wongirikab.go.id/home.php	500	250	0	0	0	750
189	KAB. WONOSOBO	JAWA TENGAH	wonosobokab.go.id	500	250	0	0	0	750
190	KOTA SALATIGA	JAWA TENGAH	salatigakota.go.id	500	250	0	0	0	750
191	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	semarangkota.go.id	500	250	0	0	0	750
192	KOTA TEGAL	JAWA TENGAH	tegakota.go.id	500	250	0	0	0	750
193	KAB. GUNUNG KIDUL	DI YOGYAKARTA	gunungkidulkab.go.id	500	250	0	0	0	750
194	KAB. SLEMAN	DI YOGYAKARTA	slemankab.go.id	500	250	0	0	0	750
195	KAB. BANGKALAN	JAWA TIMUR	http://bangkalankab.go.id	500	250	0	0	0	750
196	KAB. BONDOWOSO	JAWA TIMUR	bondowosokab.go.id	500	250	0	0	0	750
197	KAB. GRESIK	JAWA TIMUR	gresikkab.go.id	500	250	0	0	0	750
198	KOTA KEDIRI	JAWA TIMUR	kedirikota.go.id	500	250	0	0	0	750
199	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	probolinggokota.go.id	500	250	0	0	0	750
200	KAB. LUMAJANG	JAWA TIMUR	lumajang.go.id	500	250	0	0	0	750
201	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR	madiunkab.go.id	500	250	0	0	0	750
202	KAB. NGAWI	JAWA TIMUR	ngawikab.go.id	500	250	0	0	0	750
203	KAB. PACITAN	JAWA TIMUR	pacitankab.go.id	500	250	0	0	0	750
204	KAB. PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	probolinggokab.go.id	500	250	0	0	0	750
205	KAB. SUMENEP	JAWA TIMUR	sumenepkab.go.id	500	250	0	0	0	750
206	KAB. TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	tulungagung.go.id	500	250	0	0	0	750
207	KOTA CILEGON	BANTEN	cilegon.go.id	500	250	0	0	0	750
208	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	www.tangerangselatankota.go.id	500	250	0	0	0	750
209	KAB. LEBAK	BANTEN	www.lebakkab.go.id	500	250	0	0	0	750
210	KAB. SERANG	BANTEN	serangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
211	KAB. TANGERANG	BANTEN	tangerangkab.go.id	500	250	0	0	0	750
212	KAB. BADUNG	BALI	badungkab.go.id	500	250	0	0	0	750
213	KAB. KLUNGKUNG	BALI	klungkungkab.go.id	500	250	0	0	0	750
214	KAB. TABANAN	BALI	tabanankab.go.id	500	250	0	0	0	750
215	KAB. ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	alorkab.go.id	500	250	0	0	0	750
216	KAB. BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	belukab.go.id	500	250	0	0	0	750
217	KAB. FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	florestimurkab.go.id	500	250	0	0	0	750
218	KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	kupangkota.go.id	500	250	0	0	0	750
219	KAB. MANGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	manggarai.go.id	500	250	0	0	0	750
220	KAB. MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	manggarai Barat kab.go.id	500	250	0	0	0	750
221	KAB. SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	saburaijuakab.go.id	500	250	0	0	0	750
222	KAB. SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	sumbatimurkab.go.id	500	250	0	0	0	750

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
223	KAB. KAYONG UTARA	KALIMANTAN BARAT	kayongutarakab.go.id	500	250	0	0	0	750
224	KOTA SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	singkawangkota.go.id	500	250	0	0	0	750
225	KAB. KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	kuburayakab.go.id	500	250	0	0	0	750
226	KAB. MELAWI	KALIMANTAN BARAT	melawikab.go.id	500	250	0	0	0	750
227	KAB. SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	sambas.go.id	500	250	0	0	0	750
228	KAB. SINTANG	KALIMANTAN BARAT	sintang.go.id	500	250	0	0	0	750
229	KAB. KATINGAN	KALIMANTAN TENGAH	katingankab.go.id	500	250	0	0	0	750
230	KOTA PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	palangkaraya.go.id	500	250	0	0	0	750
231	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	kotawaringinbaratkab.go.id	500	250	0	0	0	750
232	KAB. PULANG PISAU	KALIMANTAN TENGAH	pulangpisaukab.go.id	500	250	0	0	0	750
233	KAB. BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	balangankab.go.id	500	250	0	0	0	750
234	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	hulusungaitengahkab.go.id	500	250	0	0	0	750
235	KAB. TABALONG	KALIMANTAN SELATAN	tabalongkab.go.id	500	250	0	0	0	750
236	KAB. TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN	tanahbumbukab.go.id	500	250	0	0	0	750
237	KAB. TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	tapinkab.go.id	500	250	0	0	0	750
238	KAB. BERAU	KALIMANTAN TIMUR	beraukab.go.id	500	250	0	0	0	750
239	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	samarindakota.go.id	500	250	0	0	0	750
240	KAB. PASER	KALIMANTAN TIMUR	paserkab.go.id	500	250	0	0	0	750
241	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	SULAWESI UTARA	bolselkab.go.id	500	250	0	0	0	750
242	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	bolmutkab.go.id	500	250	0	0	0	750
243	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	SULAWESI UTARA	sangihekab.go.id	500	250	0	0	0	750
244	KOTA BITUNG	SULAWESI UTARA	bitungkota.go.id	500	250	0	0	0	750
245	KAB. MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	minselkab.go.id	500	250	0	0	0	750
246	KAB. BANGGAI	SULAWESI TENGAH	banggairkab.go.id	500	250	0	0	0	750
247	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH	bangkepkab.go.id	500	250	0	0	0	750
248	KAB. DONGGALA	SULAWESI TENGAH	donggala.go.id	500	250	0	0	0	750
249	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	palukota.go.id	500	250	0	0	0	750
250	KAB. TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH	tojounakab.go.id	500	250	0	0	0	750
251	KAB. TOLI-TOLI	SULAWESI TENGAH	tolitolikab.go.id	500	250	0	0	0	750
252	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	makassarkota.go.id	500	250	0	0	0	750
253	KAB. LUWU	SULAWESI SELATAN	luwukab.go.id	500	250	0	0	0	750
254	KAB. LUWU UTARA	SULAWESI SELATAN	luwuutara.go.id	500	250	0	0	0	750
255	KAB. TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	torajautarakab.go.id	500	250	0	0	0	750
256	KAB. KOLAKA UTARA	SULAWESI TENGGARA	kolutkab.go.id	500	250	0	0	0	750
257	KAB. KONAWA	SULAWESI TENGGARA	konawekab.go.id	500	250	0	0	0	750
258	KAB. KONAWA UTARA	SULAWESI TENGGARA	konaweutarakab.go.id	500	250	0	0	0	750
259	KAB. BOALEMO	GORONTALO	boalemokab.go.id	500	250	0	0	0	750
260	KAB. POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	polmankab.go.id	500	250	0	0	0	750
261	KAB YAHUKIMO	PAPUA	yahukimokab.go.id	500	250	0	0	0	750
262	KAB YALIMO	PAPUA	yalimokab.go.id	500	250	0	0	0	750
263	KAB KAIMANA	PAPUA BARAT	kaimanakab.go.id	500	250	0	0	0	750
264	KAB TELUK BINTUNI	PAPUA BARAT	telukbintunikab.go.id	500	250	0	0	0	750
265	KAB PEGUNUNGAN ARFAK	PAPUA BARAT	http:pegafkab.go.id	500	250	0	0	0	750
266	KAB. ACEH BARAT DAYA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehbaratdayakab.go.id	500	125	0	0	0	625
267	KAB. ACEH BESAR	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehbesarkab.go.id	500	125	0	0	0	625
268	KAB. ACEH JAYA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehjayaakab.go.id	500	125	0	0	0	625
269	KAB. ACEH TENGGARA	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehtenggarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
270	KAB. BENER MERIAH	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	benermeriahkab.go.id	500	125	0	0	0	625
271	KAB. BIREUEN	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	bireuenkab.go.id	500	125	0	0	0	625

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
272	KAB. GAYO LUES	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	gayolueskab.go.id	500	125	0	0	0	625
273	KOTA LHOKSEUMAWE	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	lhokseumawekota.go.id	500	125	0	0	0	625
274	KAB. ASAHAN	SUMATERA UTARA	pemkab-asahan.go.id	500	125	0	0	0	625
275	KAB. BATUBARA	SUMATERA UTARA	batubarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
276	KAB. DAIRI	SUMATERA UTARA	dairikab.go.id	500	125	0	0	0	625
277	KAB. DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	deliserdangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
278	KAB. KARO	SUMATERA UTARA	karokab.go.id	500	125	0	0	0	625
279	KOTA BINJAI	SUMATERA UTARA	binjaikota.go.id	500	125	0	0	0	625
280	KOTA SIBOLGA	SUMATERA UTARA	sibolgakota.go.id	500	125	0	0	0	625
281	KOTA TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA	tebingtinggikota.go.id	500	125	0	0	0	625
282	KAB. LABUHAN BATU	SUMATERA UTARA	labuhanbatukab.go.id	500	125	0	0	0	625
283	KAB. LABUHANBATU SELATAN	SUMATERA UTARA	labuhanbatuselatankab.go.id	500	125	0	0	0	625
284	KAB. LABUHANBATU UTARA	SUMATERA UTARA	labuhanbatuutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
285	KAB. LANGKAT	SUMATERA UTARA	langkatkab.go.id	500	125	0	0	0	625
286	KAB. NIAS BARAT	SUMATERA UTARA	niasbaratkab.go.id	500	125	0	0	0	625
287	KAB. NIAS SELATAN	SUMATERA UTARA	niasselatankab.go.id	500	125	0	0	0	625
288	KAB. NIAS UTARA	SUMATERA UTARA	niasutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
289	KAB. PAKPAK BHARAT	SUMATERA UTARA	http:pakpakhartakab.go.id	500	125	0	0	0	625
290	KAB. SERDANG BADAGAI	SUMATERA UTARA	serdangbedagaikab.go.id	500	125	0	0	0	625
291	KAB. SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA	simalungunkab.go.id	500	125	0	0	0	625
292	KAB. TAPANULI SELATAN	SUMATERA UTARA	tapanuliselatankab.go.id	500	125	0	0	0	625
293	KAB. TAPANULI TENGAH	SUMATERA UTARA	tapteng.go.id	500	125	0	0	0	625
294	KAB. TAPANULI UTARA	SUMATERA UTARA	www.taputkab.go.id	500	125	0	0	0	625
295	KAB. SOLOK	SUMATERA BARAT	solokkab.go.id	500	125	0	0	0	625
296	KAB. KEPULAUAN MERANTI	RIAU	merantikab.go.id	500	125	0	0	0	625
297	KOTA PEKAN BARU	RIAU	pekanbaru.go.id	500	125	0	0	0	625
298	KAB. KUANTAN SENGINGI	RIAU	kuansing.go.id	500	125	0	0	0	625
299	KAB. ROKAN HILIR	RIAU	rohiikab.go.id	500	125	0	0	0	625
300	KAB. KERINCI	JAMBI	kerincikab.go.id	500	125	0	0	0	625
301	KAB. BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	banyuasinkab.go.id	500	125	0	0	0	625
302	KAB. EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	empatlawangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
303	KOTA PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	pagaralamkota.go.id	500	125	0	0	0	625
304	KOTA PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	kotaprabumulih.go.id	500	125	0	0	0	625
305	KAB. OKU SELATAN	SUMATERA SELATAN	okuselatankab.go.id	500	125	0	0	0	625
306	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	SUMATERA SELATAN	palikab.go.id	500	125	0	0	0	625
307	KAB. MUSI RAWAS UTARA	SUMATERA SELATAN	muratarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
308	KAB. KEPAHANG	BENGGKULU	kepahiangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
309	KAB. LEBONG	BENGGKULU	lebongkab.go.id	500	125	0	0	0	625
310	KAB. LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	lampungtengahkab.go.id	500	125	0	0	0	625
311	KAB. LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	lampungtimurkab.go.id	500	125	0	0	0	625
312	KAB. LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	lampungutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
313	KAB. MESUJI	LAMPUNG	mesujikab.go.id	500	125	0	0	0	625
314	KAB. PESAWARAN	LAMPUNG	pesawarankab.go.id	500	125	0	0	0	625
315	KAB. TULANG BAWANG BARAT	LAMPUNG	tulangbawangbaratkab.go.id	500	125	0	0	0	625
316	KAB. WAY KANAN	LAMPUNG	waykanan.go.id	500	125	0	0	0	625
317	KAB. BELITUNG	KEP. BANGKA BELITUNG	belitungkab.go.id	500	125	0	0	0	625
318	KAB. BEKASI	JAWA BARAT	bekasikab.go.id	500	125	0	0	0	625
319	KAB. CIANJUR	JAWA BARAT	cianjurkab.go.id	500	125	0	0	0	625
320	KAB. KARAWANG	JAWA BARAT	karawangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
321	KOTA BANJAR	JAWA BARAT	banjar-jabar.go.id	500	125	0	0	0	625
322	KOTA SUKABUMI	JAWA BARAT	sukabumikota.go.id	500	125	0	0	0	625
323	KAB. PURWAKARTA	JAWA BARAT	purwakartakab.go.id	500	125	0	0	0	625
324	KAB. TASIKMALAYA	JAWA BARAT	tasikmalayakab.go.id	500	125	0	0	0	625
325	KAB. BANYUMAS	JAWA TENGAH	banyumaskab.go.id	500	125	0	0	0	625
326	KAB. KLATEN	JAWA TENGAH	klatenkab.go.id	500	125	0	0	0	625
327	KAB. SEMARANG	JAWA TENGAH	semarangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
328	KOTA SURAKARTA	JAWA TENGAH	surakarta.go.id	500	125	0	0	0	625

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
329	KAB. JEMBER	JAWA TIMUR	jemberkab.go.id	500	125	0	0	0	625
330	KAB. KEDIRI	JAWA TIMUR	kediririkab.go.id	500	125	0	0	0	625
331	KOTA MALANG	JAWA TIMUR	malangkota.go.id	500	125	0	0	0	625
332	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	mojokertokota.go.id	500	125	0	0	0	625
333	KAB. PAMEKASAN	JAWA TIMUR	pamekasankab.go.id	500	125	0	0	0	625
334	KAB. SIDOARJO	JAWA TIMUR	sidoarjokab.go.id	500	125	0	0	0	625
335	KOTA SERANG	BANTEN	serangkota.go.id	500	125	0	0	0	625
336	KAB. BULELENG	BALI	bulelengkab.go.id	500	125	0	0	0	625
337	KAB. BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	bimakab.go.id	500	125	0	0	0	625
338	KAB. LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	lombokbaratkab.go.id	500	125	0	0	0	625
339	KAB. LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	lombokutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
340	KAB. ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	endekab.go.id	500	125	0	0	0	625
341	KAB. NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	nagekeokab.go.id	500	125	0	0	0	625
342	KAB. NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	ngadakab.go.id	500	125	0	0	0	625
343	KAB. ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	rotendaokab.go.id	500	125	0	0	0	625
344	KAB. SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	sumbatengahkab.go.id	500	125	0	0	0	625
345	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	ttskab.go.id	500	125	0	0	0	625
346	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	ttukab.go.id	500	125	0	0	0	625
347	KAB. BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	bengkayangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
348	KAB. KAPUAS HULU	KALIMANTAN BARAT	kapuashulukab.go.id	500	125	0	0	0	625
349	KAB. KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	ketapangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
350	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	pontianakkota.go.id	500	125	0	0	0	625
351	KAB. SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	sanggau.go.id	500	125	0	0	0	625
352	KAB. SEKADAU	KALIMANTAN BARAT	sekadaukab.go.id	500	125	0	0	0	625
353	KAB. BARITO SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	baritoseletankab.go.id	500	125	0	0	0	625
354	KAB. GUNUNG MAS	KALIMANTAN TENGAH	gunungmaskab.go.id	500	125	0	0	0	625
355	KAB. KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	kapuaskab.go.id	500	125	0	0	0	625
356	KAB. MURUNG RAYA	KALIMANTAN TENGAH	kabmurungraya.go.id	500	125	0	0	0	625
357	KAB. SERUYAN	KALIMANTAN TENGAH	seruyankab.go.id	500	125	0	0	0	625
358	KAB. BARITO KUALA	KALIMANTAN SELATAN	http:baritokualakab.go.id	500	125	0	0	0	625
359	KAB. HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN	hulusungaiutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
360	KOTA BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	banjarbarukota.go.id	500	125	0	0	0	625
361	KAB. KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR	kubarkab.go.id	500	125	0	0	0	625
362	KAB. KUTAI TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	kutaitimurkab.go.id	500	125	0	0	0	625
363	KOTA TARAOKAN	KALIMANTAN UTARA	tarakankota.go.id	500	125	0	0	0	625
364	KAB. MALINAU	KALIMANTAN UTARA	malinau.go.id	500	125	0	0	0	625
365	KAB. NUNUKAN	KALIMANTAN UTARA	nunukankab.go.id	500	125	0	0	0	625
366	KAB. BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	bolmongkab.go.id	500	125	0	0	0	625
367	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	boltimkab.go.id	500	125	0	0	0	625
368	KOTA KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	kotamobagukota.go.id	500	125	0	0	0	625
369	KOTA TOMOHON	SULAWESI UTARA	tomohonkota.go.id	500	125	0	0	0	625
370	KAB. MINAHASA	SULAWESI UTARA	minahasa.go.id	500	125	0	0	0	625
371	KAB. BANGGAI LAUT	SULAWESI TENGAH	banggailautkab.go.id	500	125	0	0	0	625
372	KAB. BUOL	SULAWESI TENGAH	buolkab.go.id	500	125	0	0	0	625
373	KAB. MOROWALI UTARA	SULAWESI TENGAH	morowaliutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
374	KAB. POSO	SULAWESI TENGAH	posokab.go.id	500	125	0	0	0	625
375	KAB. SIGI	SULAWESI TENGAH	sigikab.go.id	500	125	0	0	0	625
376	KAB. BANTAENG	SULAWESI SELATAN	bantaengkab.go.id	500	125	0	0	0	625
377	KAB. BARRU	SULAWESI SELATAN	barrukab.go.id	500	125	0	0	0	625
378	KAB. BONE	SULAWESI SELATAN	bonekab.go.id	500	125	0	0	0	625
379	KAB. BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN	bulukumbakab.go.id	500	125	0	0	0	625
380	KAB. ENREKANG	SULAWESI SELATAN	enrekangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
381	KAB. JENEPONTO	SULAWESI SELATAN	jenepontokab.go.id	500	125	0	0	0	625
382	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	palopokota.go.id	500	125	0	0	0	625
383	KAB. MAROS	SULAWESI SELATAN	maroskab.go.id	500	125	0	0	0	625

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
384	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	SULAWESI SELATAN	pangkepkab.go.id	500	125	0	0	0	625
385	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	SULAWESI SELATAN	http:kepulauanelayarkab.g o.id	500	125	0	0	0	625
386	KAB. SIDENRENG RAPANG	SULAWESI SELATAN	sidrapkab.go.id	500	125	0	0	0	625
387	KAB. TAKALAR	SULAWESI SELATAN	takalarkab.go.id	500	125	0	0	0	625
388	KAB. TANA TORAJA	SULAWESI SELATAN	tanatorajakab.go.id	500	125	0	0	0	625
389	KAB. WAJO	SULAWESI SELATAN	wajokab.go.id	500	125	0	0	0	625
390	KAB. BOMBANA	SULAWESI TENGGARA	bombanakab.go.id	500	125	0	0	0	625
391	KAB. BUTON UTARA	SULAWESI TENGGARA	butonutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
392	KOTA BAU-BAU	SULAWESI TENGGARA	baubaukota.go.id	500	125	0	0	0	625
393	KAB. WAKATOBI	SULAWESI TENGGARA	wakatobikab.go.id	500	125	0	0	0	625
394	KAB. MAJENE	SULAWESI BARAT	majenekab.go.id	500	125	0	0	0	625
395	KAB. MAMASA	SULAWESI BARAT	mamasakab.go.id	500	125	0	0	0	625
396	KAB. MAMUJU	SULAWESI BARAT	mamujukab.go.id	500	125	0	0	0	625
397	KAB. MAMUJU UTARA	SULAWESI BARAT	mamujuutarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
398	KAB. BURU	MALUKU	burukab.go.id	500	125	0	0	0	625
399	KAB. BURU SELATAN	MALUKU	burselkab.go.id	500	125	0	0	0	625
400	KAB. KEPULAUAN ARU	MALUKU	kepulauanarukab.go.id	500	125	0	0	0	625
401	KAB. MALUKU TENGAH	MALUKU	maltengkab.go.id	500	125	0	0	0	625
402	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	MALUKU	http:mtbkab.go.idindex.ht ml	500	125	0	0	0	625
403	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	serambagiantimurkab.go.id	500	125	0	0	0	625
404	KAB. HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	www.halbarkab.go.id	500	125	0	0	0	625
405	KAB. HALMAHERA SELATAN	MALUKU UTARA	halselkab.go.id	500	125	0	0	0	625
406	KAB. HALMAHERA TENGAH	MALUKU UTARA	haltengkab.go.id	500	125	0	0	0	625
407	KAB. HALMAHERA UTARA	MALUKU UTARA	halmaherautarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
408	KAB. PULAU MOROTAI	MALUKU UTARA	pulaumorotakab.go.id	500	125	0	0	0	625
409	KAB BOVEN DIGOEL	PAPUA	bovendigoelkab.go.id	500	125	0	0	0	625
410	KAB INTAN JAYA	PAPUA	intanjayakab.go.id	500	125	0	0	0	625
411	KAB JAYAWIJAYA	PAPUA	jayawijayakab.go.id	500	125	0	0	0	625
412	KAB ASMAT	PAPUA	asmatkab.go.id	500	125	0	0	0	625
413	KAB BIAK NUMFOR	PAPUA	biakkab.go.id	500	125	0	0	0	625
414	KAB DEIYAI	PAPUA	deiyaikab.go.id	500	125	0	0	0	625
415	KAB JAYAPURA	PAPUA	jayapurakab.go.id	500	125	0	0	0	625
416	KAB NDUGA	PAPUA	ndugakab.go.id	500	125	0	0	0	625
417	KAB KEEROM	PAPUA	keeromkab.go.id	500	125	0	0	0	625
418	KAB MAPPI	PAPUA	mappikab.go.id	500	125	0	0	0	625
419	KAB MERAUKE	PAPUA	merauke.go.id	500	125	0	0	0	625
420	KAB MIMIKA	PAPUA	mimikakab.go.id	500	125	0	0	0	625
421	KAB NABIRE	PAPUA	http:nabirekab.go.id	500	125	0	0	0	625
422	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	PAPUA	pegbintangkab.go.id	500	125	0	0	0	625
423	KAB PUNCAK	PAPUA	puncakkab.go.id	500	125	0	0	0	625
424	KAB PUNCAK JAYA	PAPUA	puncakjayakab.go.id	500	125	0	0	0	625
425	KAB SARMI	PAPUA	sarmikab.go.id	500	125	0	0	0	625
426	KAB TOLIKARA	PAPUA	tolikarakab.go.id	500	125	0	0	0	625
427	KAB WAROPEN	PAPUA	waropenkab.go.id	500	125	0	0	0	625
428	KOTA JAYAPURA	PAPUA	jayapurakota.go.id	500	125	0	0	0	625
429	KAB MANOKWARI	PAPUA BARAT	manokwarikab.go.id	500	125	0	0	0	625
430	KAB SORONG	PAPUA BARAT	sorongkab.go.id	500	125	0	0	0	625
431	KOTA SORONG	PAPUA BARAT	sorongkota.go.id	500	125	0	0	0	625
432	KAB FAKFAK	PAPUA BARAT	fakfakkab.go.id	500	125	0	0	0	625
433	KAB RAJA AMPAT	PAPUA BARAT	rajaampatkab.go.id	500	125	0	0	0	625
434	KAB TELUK WONDAMA	PAPUA BARAT	wondamakab.go.id	500	125	0	0	0	625
435	KOTA GUNUNG SITOLI	SUMATERA UTARA	gunungsitolikota.go.id	375	0	0	0	0	375
436	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	hulusungaiselatankab.go.id	375	0	0	0	0	375
437	KAB. MINAHASA TENGGARA	SULAWESI UTARA	mitrakab.go.id	375	0	0	0	0	375
438	KAB. MOROWALI	SULAWESI TENGAH	morowalikab.go.id	375	0	0	0	0	375

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
439	KAB. PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	parigimoutongkab.go.id	375	0	0	0	0	375
440	KAB. HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	haltimkab.go.id	375	0	0	0	0	375
441	KAB TAMBRAUW	PAPUA BARAT	http:tambrauwkab.go.id	375	0	0	0	0	375
442	KAB. ACEH TAMIANG	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehtamiangkab.go.id	250	0	0	0	0	250
443	KAB. ACEH TIMUR	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	acehtimurkab.go.id	250	0	0	0	0	250
444	KAB. SIMEULUE	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	simeuluekab.go.id	250	0	0	0	0	250
445	KOTA SUBULUSSALAM	NANGGRO ACEH DARUSSALAM	http:subulussalamkota.go.id	250	0	0	0	0	250
446	KOTA PADANG SIDEMPUAN	SUMATERA UTARA	padangsidempuan.go.id	250	0	0	0	0	250
447	KOTA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	pematangsiantarkota.go.id	250	0	0	0	0	250
448	KOTA TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	tanjungbalaikota.go.id	250	0	0	0	0	250
449	KAB. NIAS	SUMATERA UTARA	niaskab.go.id	250	0	0	0	0	250
450	KAB. PADANG LAWAS	SUMATERA UTARA	padanglawaskab.go.id	250	0	0	0	0	250
451	KAB. PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	padanglawasutarakab.go.id	250	0	0	0	0	250
452	KAB. LIMA PULUH KOTA	SUMATERA BARAT	limapuluhkota.go.id	250	0	0	0	0	250
453	KAB. BENGKALIS	RIAU	bengkaliskab.go.id	250	0	0	0	0	250
454	KOTA LUBUK LINGGAU	SUMATERA SELATAN	lubuklinggaukota.go.id	250	0	0	0	0	250
455	KAB. MUSI RAWAS	SUMATERA SELATAN	musi-rawas.go.id	250	0	0	0	0	250
456	KAB. OGAN KOMERING ULU	SUMATERA SELATAN	okukab.go.id	250	0	0	0	0	250
457	KAB. KAUR	BENGGKULU	kaurkab.go.id	250	0	0	0	0	250
458	KAB. LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	lampungbaratkab.go.id	250	0	0	0	0	250
459	KAB. BANGKA SELATAN	KEP. BANGKA BELITUNG	bangkaselatankab.go.id	250	0	0	0	0	250
460	KOTA PANGKAL PINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	http:pangkalpinangkota.go.id	250	0	0	0	0	250
461	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	tanjungpinangkota.go.id	250	0	0	0	0	250
462	KAB. SUMEDANG	JAWA BARAT	sumedangkab.go.id	250	0	0	0	0	250
463	KAB. BOYOLALI	JAWA TENGAH	boyolalikab.go.id	250	0	0	0	0	250
464	KAB. DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	dompukab.go.id	250	0	0	0	0	250
465	KAB. LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	lembatakab.go.id	250	0	0	0	0	250
466	KAB. MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	www.manggaraitimurkab.go.id	250	0	0	0	0	250
467	KAB. SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	sumbabaratkab.go.id	250	0	0	0	0	250
468	KAB. SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	sbdkab.go.id	250	0	0	0	0	250
469	KAB. LANDAK	KALIMANTAN BARAT	landakkab.go.id	250	0	0	0	0	250
470	KAB. BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	baritotimurkab.go.id	250	0	0	0	0	250
471	KAB. BARITO UTARA	KALIMANTAN TENGAH	baritoutarakab.go.id	250	0	0	0	0	250
472	KAB. MAHAKAM ULU	KALIMANTAN TIMUR	mahakamulukab.go.id	250	0	0	0	0	250
473	KAB TANA TIDUNG	KALIMANTAN UTARA	tanatidungkab.go.id	250	0	0	0	0	250
474	KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	SULAWESI UTARA	sitarokab.go.id	250	0	0	0	0	250
475	KAB. KEPULAUAN TALAUD	SULAWESI UTARA	talautkab.go.id	250	0	0	0	0	250
476	KAB. GOWA	SULAWESI SELATAN	gowakab.go.id	250	0	0	0	0	250
477	KAB. PINRANG	SULAWESI SELATAN	pinrangkab.go.id	250	0	0	0	0	250
478	KAB. SOPPENG	SULAWESI SELATAN	soppengkab.go.id	250	0	0	0	0	250
479	KOTA PAREPARE	SULAWESI SELATAN	http:pareparekota.go.id	250	0	0	0	0	250
480	KAB. MUNA	SULAWESI TENGGARA	munakab.go.id	250	0	0	0	0	250
481	KAB. GORONTALO	GORONTALO	gorontalokab.go.id	250	0	0	0	0	250
482	KAB. GORONTALO UTARA	GORONTALO	gorutkab.go.id	250	0	0	0	0	250
483	KAB. POHUWATO	GORONTALO	pohuwatokab.go.id	250	0	0	0	0	250
484	KAB. MALUKU BARAT DAYA	MALUKU	malukubaratdaya.go.id	250	0	0	0	0	250

NO	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	ALAMAT WEBSITE	SKOR					
				Keberadaan website resmi	Keberadaan menu TPAD	Ketersediaan data terbaru 2014	Ketersediaan data tahun sebelumnya - 2013	Kualitas penyajian informasi	Total
485	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	http:sbbkab.go.id	250	0	0	0	0	250
486	KAB. KEPULAUAN SULA	MALUKU UTARA	kepulauansula.go.id	250	0	0	0	0	250
487	KOTA TERNATE	MALUKU UTARA	ternatekota.go.id	250	0	0	0	0	250
488	KOTA TIDORE KEPULAUAN	MALUKU UTARA	tidorekota.go.id	250	0	0	0	0	250
489	KAB KEPULAUAN YAPEN	PAPUA	http:kepulauanypenkab.go .id	250	0	0	0	0	250
490	KAB MAMBERAMO RAYA	PAPUA	mamberamorayakab.go.id	250	0	0	0	0	250
491	KAB DOGIYAI	PAPUA	dogiyaiKab.go.id	250	0	0	0	0	250
492	KAB LANNY JAYA	PAPUA	lannyjaya.go.id	250	0	0	0	0	250
493	KAB .MAMBERAMO TENGAH	PAPUA	mamberamotengah.go.id	250	0	0	0	0	250
494	KAB PANIAI	PAPUA	paniai.go.id	250	0	0	0	0	250
495	KAB SUPIORI	PAPUA	supiori.go.id	250	0	0	0	0	250
496	KAB SORONG SELATAN	PAPUA BARAT	sorongselatankab.go.id	250	0	0	0	0	250
497	KAB MAYBRAT	PAPUA BARAT	maybrat.go.id	250	0	0	0	0	250
498	KAB. PANGANDARAN	JAWA BARAT		125	0	0	0	0	125
499	KAB. MALAKA	NUSA TENGGARA TIMUR		125	0	0	0	0	125
500	KAB. KOLAKA TIMUR	SULAWESI TENGGARA		125	0	0	0	0	125
501	KAB. KONAWA KEPULAUAN	SULAWESI TENGGARA		125	0	0	0	0	125
502	MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT		125	0	0	0	0	125
503	KOTA TUAL	MALUKU		125	0	0	0	0	125
504	KAB. PULAU TALIABU	MALUKU UTARA		125	0	0	0	0	125
505	KAB MANOKWARI SELATAN	PAPUA BARAT		125	0	0	0	0	125

